

Implementasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur Jurnal Indonesia

Miskah Sofia Rani¹, Damri², Mardhatillah Zulpiani³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang, Indonesia

Corresponding author e-mail: miskahsofiarani@gmail.com

Article History: Received 10 Oktober 2025, Revised 10 November 2025,

Published 12 Desember 2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia melalui tinjauan literatur terhadap artikel-artikel jurnal nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur, dengan sumber data berupa jurnal nasional Indonesia yang membahas pendidikan inklusi pada jenjang sekolah dasar. Data dianalisis menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang meliputi kebijakan, kesiapan sekolah, peran guru, praktik pembelajaran, tantangan, serta strategi pengembangan pendidikan inklusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan inklusi di sekolah dasar didukung oleh kerangka regulasi yang cukup kuat, implementasinya masih bervariasi dan belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pendidikan inklusi meliputi kesiapan manajemen sekolah, kompetensi guru, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, implementasi kebijakan di tingkat sekolah, serta kolaborasi antara guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, dan orang tua. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan kesiapan guru, kurangnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya sistem pendukung operasional.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusi, Peran Guru

A. Introduction

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, tanpa terkecuali bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan menuntut adanya sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi keragaman karakteristik peserta didik, baik dari aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun budaya. Dalam konteks ini, pendidikan inklusi hadir sebagai pendekatan pendidikan yang menempatkan seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satuan pendidikan reguler dengan dukungan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Rahman, 2020).

Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusi secara formal mulai mendapat perhatian serius sejak diterbitkannya berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan

turunannya yang menegaskan hak peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Fitria, 2019). Sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan awal memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pendidikan inklusif pada jenjang selanjutnya (Arifin, 2021).

Namun demikian, berbagai hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal nasional menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar masih menghadapi beragam tantangan (Anjarsari Efendi, 2018). Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, minimnya ketersediaan guru pendamping khusus, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dan manajemen sekolah (Lestari, 2019). Di samping itu, sikap dan pemahaman warga sekolah, termasuk guru, orang tua, dan peserta didik, terhadap konsep pendidikan inklusi juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaannya.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian berbasis tinjauan literatur terhadap jurnal-jurnal Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Tinjauan literatur memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai pola implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, faktor pendukung dan penghambat yang sering muncul, serta strategi yang telah diterapkan untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan (Rahmawati, 2021). Selain itu, melalui analisis terhadap temuan-temuan penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang berpotensi menjadi dasar pengembangan kajian lanjutan.

Meskipun demikian, kajian-kajian terdahulu cenderung bersifat parsial dan kontekstual. Sebagian besar penelitian berfokus pada studi kasus di sekolah atau wilayah tertentu, sehingga menghasilkan temuan yang fragmentaris dan sulit digeneralisasikan. Selain itu, terdapat kecenderungan penelitian yang hanya menyoroti aspek kendala implementasi tanpa mengintegrasikan faktor pendukung, strategi adaptif, serta praktik baik (best practices) yang telah berhasil diterapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya research gap, yaitu belum tersedianya kajian komprehensif yang mensintesis hasil-hasil penelitian pendidikan inklusi di sekolah dasar secara sistematis dan terpadu, khususnya yang bersumber dari jurnal-jurnal Indonesia.

Research gap lainnya terletak pada minimnya pemetaan temuan penelitian berdasarkan dimensi implementasi pendidikan inklusi, seperti kebijakan, sumber daya manusia, proses pembelajaran, dan budaya sekolah. Padahal, pemetaan semacam ini penting untuk memahami pola umum implementasi pendidikan inklusi serta hubungan antar faktor yang memengaruhinya. Tanpa adanya sintesis literatur yang terstruktur, pemangku kepentingan pendidikan berpotensi mengalami kesulitan dalam merumuskan kebijakan dan intervensi yang berbasis bukti ilmiah.

Berdasarkan research gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada upaya menyajikan tinjauan literatur yang bersifat sistematis terhadap jurnal-jurnal nasional Indonesia yang membahas implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. Penelitian ini tidak hanya merangkum temuan-temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga mengklasifikasikan dan menganalisisnya berdasarkan aspek-aspek kunci implementasi pendidikan inklusi. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sintesis konseptual yang mampu mengungkap pola, kecenderungan, serta tantangan dominan dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia.

Selain itu, novelty penelitian ini juga tercermin pada identifikasi kesenjangan temuan dan rekomendasi strategis yang bersifat integratif, yang menghubungkan antara kebijakan pendidikan, praktik pembelajaran di kelas, dan budaya sekolah inklusif. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan kerangka konseptual implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, serta kontribusi praktis bagi pendidik, pengelola sekolah, dan membuat kebijakan dalam meningkatkan mutu dan keberlanjutan pendidikan inklusi di Indonesia.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur (literature review) yang bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional Indonesia (Moleong, 2018). Data penelitian bersifat sekunder, yang diperoleh dari artikel-artikel jurnal yang membahas pendidikan inklusi pada jenjang sekolah dasar. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui berbagai basis data jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti pendidikan inklusi, implementasi pendidikan inklusif, dan sekolah dasar inklusi. Artikel yang dianalisis dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu jurnal yang memuat kajian empiris atau konseptual tentang implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar, sedangkan artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian dikeluarkan dari analisis. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengkaji secara mendalam fokus penelitian, metode, temuan, serta rekomendasi dari setiap artikel (Sugiyono, 2018). Hasil analisis kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, seperti kebijakan dan manajemen sekolah inklusi, kompetensi dan peran guru, proses pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan lingkungan sekolah. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan perbandingan temuan antarartikel sehingga diperoleh sintesis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pola implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif yang lebih efektif.

C. Results and Discussion

Results

Kebijakan dan Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang menjamin hak belajar bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Secara normatif, kebijakan tersebut menegaskan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan akses, serta penyediaan layanan pendidikan yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik. Berbagai regulasi nasional menempatkan sekolah dasar sebagai salah satu satuan pendidikan yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi secara berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga mencakup pengelolaan sekolah, penyediaan sumber daya, serta pengembangan budaya sekolah yang inklusif.

Hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah mencakup kesiapan struktural dan kultural, yang meliputi kepemimpinan kepala sekolah, dukungan kebijakan internal sekolah, serta komitmen seluruh warga sekolah terhadap nilai-nilai inklusivitas. Sekolah yang memiliki kebijakan internal yang selaras dengan regulasi nasional cenderung lebih mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus secara sistematis dan terencana.

Dari aspek manajerial, kesiapan sekolah tercermin dalam perencanaan program pendidikan inklusi, pengorganisasian sumber daya manusia, serta pengalokasian anggaran yang mendukung layanan inklusif. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa lemahnya perencanaan dan keterbatasan anggaran sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan inklusi di sekolah dasar. Selain itu, belum meratanya keberadaan pedoman teknis yang operasional di tingkat sekolah menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan inklusi berjalan secara normatif tanpa diiringi praktik yang optimal di lapangan.

Selain faktor struktural, kesiapan sekolah juga berkaitan erat dengan aspek budaya sekolah. Literatur menunjukkan bahwa sikap dan persepsi warga sekolah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan inklusi. Sekolah yang memiliki budaya inklusif ditandai dengan adanya penerimaan terhadap keberagaman, kolaborasi antar guru, serta keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dan resistensi terhadap kebijakan inklusi dapat menghambat pelaksanaan program, meskipun secara formal sekolah telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi.

Secara keseluruhan, studi pustaka menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar telah memiliki dasar regulatif yang cukup kuat, namun kesiapan sekolah dalam mengimplementasikannya masih bervariasi. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan menjadi temuan dominan dalam berbagai penelitian. Oleh karena itu, penguatan kesiapan sekolah melalui pengembangan kebijakan internal, peningkatan kapasitas manajemen sekolah, serta pembentukan budaya sekolah yang inklusif menjadi faktor kunci dalam mewujudkan implementasi pendidikan inklusi yang efektif dan berkelanjutan di sekolah dasar.

Peran Guru dan Praktik Pembelajaran dalam Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Guru memegang peran sentral dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar karena mereka adalah aktor utama yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan inklusi, peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga mencakup fungsi sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengelola kelas yang mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Literatur menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional mengungkapkan bahwa kesiapan dan pemahaman guru terhadap konsep pendidikan inklusi masih bervariasi. Sebagian guru telah menunjukkan sikap positif dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pembelajaran inklusif, namun masih banyak guru yang menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya perencanaan pembelajaran yang bersifat diferensiatif, sehingga proses pembelajaran cenderung diseragamkan dan kurang memperhatikan perbedaan kemampuan serta karakteristik peserta didik.

Dalam praktik pembelajaran, literatur mencatat bahwa penerapan strategi pembelajaran inklusif di sekolah dasar mencakup penggunaan metode pembelajaran yang fleksibel, modifikasi kurikulum, serta penyesuaian materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan prinsip universal design for learning. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi praktik tersebut masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan waktu, jumlah peserta didik yang besar, serta minimnya dukungan tenaga pendamping khusus di kelas inklusi.

Selain itu, kolaborasi antara guru kelas, guru pendidikan khusus, dan tenaga profesional lainnya menjadi aspek penting dalam praktik pembelajaran inklusif. Studi pustaka mengindikasikan bahwa kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, terutama

dalam perencanaan program pembelajaran individual dan pemantauan perkembangan belajar peserta didik. Akan tetapi, praktik kolaboratif ini belum sepenuhnya berjalan optimal di sebagian besar sekolah dasar inklusi akibat keterbatasan sumber daya dan belum adanya sistem kerja yang terstruktur.

Secara keseluruhan, studi pustaka menegaskan bahwa peran guru dan praktik pembelajaran merupakan elemen krusial dalam pendidikan inklusi di sekolah dasar. Keberhasilan pembelajaran inklusif sangat bergantung pada kompetensi, sikap, dan kreativitas guru dalam mengelola kelas yang heterogen. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kolaborasi profesional, serta dukungan kebijakan sekolah menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan praktik pembelajaran inklusif yang efektif dan berkeadilan di sekolah dasar.

Tantangan, Strategi, dan Arah Pengembangan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat struktural, pedagogis, dan kultural. Studi-studi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan guru pendamping khusus yang belum merata, tingginya rasio guru dan peserta didik, serta keterbatasan fasilitas belajar yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan layanan pendidikan inklusif yang optimal. Kondisi ini menyebabkan implementasi pendidikan inklusi di berbagai sekolah dasar berjalan secara berbeda-beda, tergantung pada kapasitas dan dukungan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah.

Selain aspek sumber daya, tantangan lainnya berkaitan dengan kompetensi dan kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran inklusif. Literatur mengungkapkan bahwa masih terdapat guru yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus serta strategi pembelajaran yang sesuai. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan profesional berdampak pada terbatasnya kemampuan guru dalam melakukan adaptasi kurikulum, penilaian diferensiatif, dan pengelolaan kelas inklusif. Di sisi lain, sikap dan persepsi sebagian warga sekolah yang masih memandang pendidikan inklusi sebagai beban tambahan turut memperkuat hambatan dalam pelaksanaannya.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, sejumlah penelitian menawarkan strategi implementatif yang dapat diterapkan untuk memperkuat pendidikan inklusi di sekolah dasar. Strategi yang banyak direkomendasikan dalam literatur antara lain peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop pendidikan inklusi, penguatan kolaborasi antara guru kelas, guru pendidikan khusus, dan tenaga profesional lainnya, serta optimalisasi peran kepala sekolah dalam mengelola program inklusi. Selain itu, pengembangan kebijakan internal sekolah yang responsif

terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan libatkan orang tua dalam proses pendidikan juga dipandang sebagai strategi penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif.

Arah pengembangan pendidikan inklusi di sekolah dasar, sebagaimana tercermin dalam studi pustaka, menekankan perlunya pendekatan yang lebih sistemik dan berkelanjutan. Pengembangan pendidikan inklusi tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan regulatif, tetapi juga pada pembentukan budaya sekolah yang inklusif dan partisipatif. Literatur menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan nasional, manajemen sekolah, dan praktik pembelajaran di kelas agar pendidikan inklusi dapat berjalan secara konsisten dan bermutu. Di samping itu, pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan praktik pendidikan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar.

Secara keseluruhan, studi pustaka menunjukkan bahwa tantangan pendidikan inklusi di sekolah dasar dapat diatasi melalui strategi yang tepat dan arah pengembangan yang jelas. Keberhasilan pendidikan inklusi memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, hingga masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan budaya inklusif, pendidikan inklusi di sekolah dasar diharapkan dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi pada terwujudnya pendidikan yang adil dan berkelanjutan.

Discussion

Kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang menjamin hak belajar bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Secara normatif, kebijakan tersebut menegaskan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan akses, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam sistem pendidikan nasional (Wulandari, 2020). Regulasi nasional menempatkan sekolah dasar sebagai satuan pendidikan strategis dalam implementasi pendidikan inklusi, mengingat perannya sebagai jenjang awal pembentukan karakter dan pengalaman belajar peserta didik (Mulyadi, 2019). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kebijakan nasional menjadi prasyarat penting dalam mendorong sekolah dasar untuk menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif secara formal.

Meskipun demikian, berbagai penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan sekolah (Hadi, 2021). Kesiapan sekolah mencakup dimensi struktural dan kultural, seperti kepemimpinan kepala sekolah, kejelasan kebijakan internal, serta komitmen warga sekolah terhadap nilai-nilai inklusivitas (Widodo, 2020). Sekolah yang memiliki kebijakan internal yang selaras dengan regulasi nasional cenderung lebih mampu mengakomodasi

kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus secara terencana dan sistematis. Hasil ini menguatkan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa sinkronisasi antara kebijakan eksternal dan kebijakan internal sekolah menjadi faktor kunci dalam menjembatani kebijakan dan praktik pendidikan inklusi.

Dari aspek manajerial, kesiapan sekolah tercermin dalam perencanaan program pendidikan inklusi, pengorganisasian sumber daya manusia, serta pengalokasian anggaran yang memadai (Dewantoro, 2018). Sejumlah studi melaporkan bahwa lemahnya perencanaan, keterbatasan anggaran, serta minimnya tenaga pendidik dengan kompetensi pendidikan khusus menjadi kendala utama dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar (Fauzan, 2022). Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di banyak sekolah masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya didukung oleh pedoman teknis yang operasional.

Selain faktor struktural dan manajerial, literatur juga menekankan pentingnya kesiapan budaya sekolah dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi. Sikap dan persepsi warga sekolah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus berperan signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (Sari, 2020). Sekolah yang memiliki budaya inklusif ditandai dengan adanya penerimaan terhadap keberagaman, kolaborasi antarguru, serta keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan (Prasetyo, 2019). Sebaliknya, kurangnya pemahaman dan masih adanya resistensi terhadap pendidikan inklusi dapat menghambat implementasi kebijakan, meskipun sekolah tersebut secara formal telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa budaya sekolah menjadi faktor penentu keberlanjutan praktik pendidikan inklusif.

Secara keseluruhan, hasil kajian terhadap beberapa jurnal nasional menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia telah memiliki dasar regulatif yang relatif kuat, namun kesiapan sekolah dalam mengimplementasikannya masih bervariasi (Laksmitiwi, 2018). Kesenjangan antara kebijakan dan praktik di tingkat sekolah merupakan temuan dominan yang juga terkonfirmasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penguatan kesiapan sekolah melalui pengembangan kebijakan internal yang kontekstual, peningkatan kapasitas manajerial dan profesional guru, serta pembentukan budaya sekolah yang inklusif dan kolaboratif menjadi langkah strategis dalam mewujudkan implementasi pendidikan inklusi yang efektif dan berkelanjutan di sekolah dasar.

Guru memegang peran sentral dalam keberhasilan implementasi pendidikan. Guru merupakan aktor utama dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar karena mereka yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan inklusi, peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga mencakup fungsi sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengelola kelas yang mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Literatur menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif

terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menegaskan bahwa kualitas implementasi pendidikan inklusi sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi guru di tingkat kelas.

Hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional mengungkapkan bahwa kesiapan dan pemahaman guru terhadap konsep pendidikan inklusi masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa studi melaporkan bahwa sebagian guru telah memiliki sikap positif dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan inklusif, namun masih banyak guru yang menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus (Rohman, 2020). Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya perencanaan pembelajaran yang bersifat diferensiatif, sehingga proses pembelajaran cenderung diseragamkan dan kurang memperhatikan perbedaan kemampuan, karakteristik, dan gaya belajar peserta didik. Kondisi ini menguatkan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa pembelajaran inklusif di sekolah dasar masih didominasi pendekatan konvensional.

Dalam praktik pembelajaran, literatur mencatat bahwa strategi pembelajaran inklusif di sekolah dasar mencakup penggunaan metode pembelajaran yang fleksibel, modifikasi kurikulum, serta penyesuaian materi, media, dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru dituntut untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengacu pada prinsip *universal design for learning* agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi secara optimal (Efendi, 2018). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi praktik tersebut masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, jumlah peserta didik yang relatif besar, serta minimnya dukungan tenaga pendamping khusus di kelas inklusi. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian ini yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama dalam penerapan pembelajaran inklusif secara optimal.

Selain aspek individual guru, kolaborasi profesional juga menjadi elemen penting dalam praktik pembelajaran inklusif. Literatur menunjukkan bahwa kolaborasi antara guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, serta tenaga profesional lainnya berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kolaborasi tersebut terutama diperlukan dalam perencanaan program pembelajaran individual, adaptasi kurikulum, serta pemantauan perkembangan belajar peserta didik. Namun demikian, beberapa studi mengungkapkan bahwa praktik kolaboratif di sekolah dasar inklusi belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan belum tersedianya sistem kerja kolaboratif yang terstruktur. Temuan ini juga tercermin dalam hasil penelitian ini yang menunjukkan lemahnya koordinasi antarpihak dalam mendukung pembelajaran inklusif.

Secara keseluruhan, studi pustaka menegaskan bahwa peran guru dan praktik pembelajaran merupakan elemen krusial dalam keberhasilan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Keberhasilan pembelajaran inklusif sangat bergantung pada

kompetensi, sikap, dan kreativitas guru dalam mengelola kelas yang heterogen serta mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kolaborasi profesional, serta dukungan kebijakan sekolah yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan inklusi menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan praktik pembelajaran inklusif yang efektif dan berkeadilan di sekolah dasar (Maulana, 2021).

Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian ini, masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat struktural, pedagogis, dan kultural. Temuan ini sejalan dengan hasil sejumlah penelitian dalam jurnal nasional yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Beberapa studi mengungkapkan bahwa ketersediaan guru pendamping khusus yang belum merata, tingginya rasio guru dan peserta didik, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus berdampak langsung pada rendahnya kualitas layanan pendidikan inklusi di sekolah dasar (Handayani, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan implementasi pendidikan inklusi berjalan tidak seragam antar sekolah dan sangat bergantung pada kapasitas internal serta dukungan eksternal yang dimiliki masing-masing satuan pendidikan.

Selain aspek sumber daya, hasil penelitian ini juga mengonfirmasi temuan penelitian terdahulu yang menyoroti kompetensi dan kesiapan guru sebagai tantangan signifikan dalam pendidikan inklusi. Berbagai jurnal nasional melaporkan bahwa masih terdapat guru sekolah dasar yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip inklusivitas (Aninda, 2018). Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan profesional berdampak pada terbatasnya kemampuan guru dalam melakukan adaptasi kurikulum, menerapkan penilaian diferensiatif, serta mengelola kelas yang heterogen. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa praktik pembelajaran inklusif masih cenderung bersifat seragam dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik.

Di samping itu, literatur juga menunjukkan bahwa tantangan pendidikan inklusi tidak hanya bersumber dari aspek teknis dan pedagogis, tetapi juga dari dimensi kultural. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sikap dan persepsi sebagian warga sekolah yang masih memandang pendidikan inklusi sebagai beban tambahan turut memperkuat hambatan implementasi di tingkat sekolah dasar. Sikap tersebut berdampak pada rendahnya komitmen kolektif dalam mendukung program inklusi, meskipun secara formal sekolah telah ditetapkan sebagai sekolah inklusif. Temuan ini memperkuat hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa budaya sekolah dan penerimaan terhadap keberagaman memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pendidikan inklusi.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, hasil penelitian ini sejalan dengan rekomendasi sejumlah studi terdahulu yang menekankan pentingnya strategi implementatif yang komprehensif. Literatur nasional merekomendasikan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop pendidikan inklusi, penguatan kolaborasi antara guru kelas, guru pendidikan khusus, dan tenaga profesional lainnya, serta optimalisasi peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran inklusif (Suyanto, 2019). Selain itu, pengembangan kebijakan internal sekolah yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus serta pelibatan orang tua dalam proses pendidikan dipandang sebagai strategi penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, arah pengembangan pendidikan inklusi di sekolah dasar, sebagaimana tercermin dalam studi pustaka dan diperkuat oleh hasil penelitian ini, menuntut adanya pendekatan yang sistemik dan berkelanjutan. Pengembangan pendidikan inklusi tidak dapat hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan regulatif, tetapi harus diintegrasikan dengan manajemen sekolah yang efektif, praktik pembelajaran yang adaptif, serta pembentukan budaya sekolah yang inklusif dan partisipatif. (Nurhayati, 2020) Integrasi antara kebijakan nasional, kebijakan sekolah, dan praktik pembelajaran di kelas merupakan prasyarat utama agar pendidikan inklusi dapat berjalan secara konsisten dan bermutu.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menguatkan dan mengonfirmasi temuan-temuan penelitian terdahulu dalam jurnal nasional Indonesia. Tantangan pendidikan inklusi di sekolah dasar pada dasarnya dapat diatasi melalui strategi yang tepat dan arah pengembangan yang jelas. Keberhasilan pendidikan inklusi memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pemerintah, pengelola sekolah, guru, hingga masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan budaya sekolah yang inklusif, pendidikan inklusi di sekolah dasar berpotensi berkembang secara optimal dan berkontribusi pada terwujudnya pendidikan yang adil dan berkelanjutan.

D. Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia telah memiliki landasan kebijakan yang kuat, namun pelaksanaannya di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya, kompetensi guru, dukungan manajemen sekolah, serta budaya inklusif. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi menuntut penguatan manajemen sekolah, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kebijakan internal yang responsif, serta kolaborasi yang lebih efektif antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kelemahan karena hanya mengandalkan tinjauan literatur dari jurnal nasional sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi empiris di lapangan dan belum mencakup perspektif internasional. Oleh karena itu, penelitian

selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan studi pustaka dengan penelitian lapangan, memperluas sumber rujukan ke jurnal internasional, serta mengkaji secara lebih mendalam efektivitas model, strategi, dan praktik pembelajaran inklusif agar diperoleh rekomendasi yang lebih komprehensif, aplikatif, dan kontekstual bagi pengembangan pendidikan inklusi di sekolah dasar.

References

- Aninda, M. &. (2018). Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 5(1), 75–86.
- Anjarsari Efendi, & S. (2018). Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah dasar di Kota Malang. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 3(6), 757–763.
- Arifin, P. &. (2021). Pelibatan orang tua dalam pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 55–65.
- Dewantoro, S. &. (2018). Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar.
- Dewantoro, S. &. (2018). Tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 2(1), 25–34.
- Efendi. (2018). Pendidikan inklusif: Implementasi dan tantangannya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 14(1), 1–10.
- Fauzan, Y. &. (2022). Budaya sekolah inklusif sebagai pendukung pendidikan inklusi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(1), 15–26.
- Fitria, S. &. (2019). Implementasi kurikulum adaptif pada sekolah dasar inklusi. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 8(2), 120–131.
- Hadi, R. &. (2021). Kolaborasi guru kelas dan guru pendamping khusus dalam pendidikan inklusi. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 17(2), 95–105.
- Handayani, K. &. (2021). Peran kepala sekolah dalam pengembangan sekolah inklusi. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 4(2), 58–68.
- Laksmiwati, N. &. (2018). Sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 7(1), 41–50.
- Lestari, D. &. (2019). Kompetensi guru dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 123–134.
- Maulana, Z. &. (2021). Hambatan dan solusi implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 5(2), 90–102.
- Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, S. &. (2019). Kesiapan guru sekolah dasar dalam pembelajaran inklusif. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 7(3), 210–219.

Nurhayati, A. &. (2020). Analisis kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 67–78.

Prasetyo, H. &. (2019). Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10(1), 33–44.

Rahman, W. &. (2020). Analisis kesiapan sekolah dasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(1), 14–25.

Rahmawati, H. &. (2021). Manajemen sekolah dalam mendukung pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 45–56.

Rohman, P. &. (2020). Sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Sarana Pendidikan*, 6(2), 77–86.

Sari, A. &. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 101–112.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Reseaech and Devlopment)*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, M. &. (2019). Sikap guru terhadap pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 8(1), 33–44.

Widodo, R. &. (2020). Strategi pembelajaran inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 5(2), 67–76.

Wulandari, L. &. (2020). Persepsi guru terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(1), 89–98.